

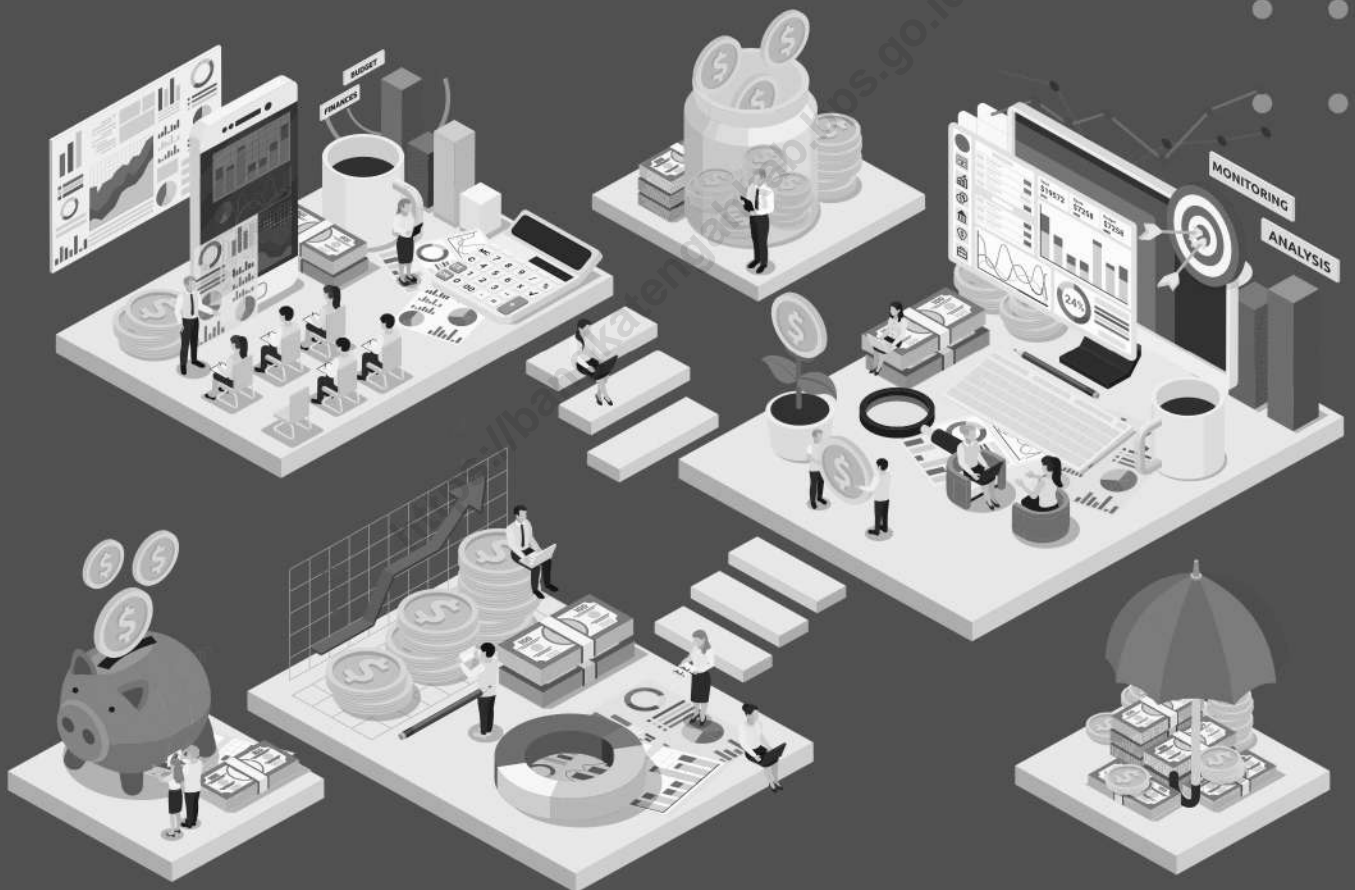
# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran 2017-2021



<https://bangkatangkep.go.id>



# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran 2017-2021



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH 2017–2021**

---

ISBN :  
Nomor Publikasi : 19040.1904  
Katalog : 9302023.1904  
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv + 70 halaman

Penyunting:

BPS Kabupaten Bangka Tengah

Naskah:

BPS Kabupaten Bangka Tengah

Desain Kover oleh:

BPS Kabupaten Bangka Tengah

Penerbit:

© BPS Kabupaten Bangka Tengah

Edisi pertama

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH 2017-2021**

---

**Tim Penyusun:**

Pengarah dan Penanggung Jawab : Ir. Rizanal Mahmudin

Editor : Meta Septianingrum, S.Si

Penulis : Yuyun Wahyuningtyas, SST

Desain Kover : Fadhila Ajeng Damaris, S.Tr.Stat

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>





## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota) pada periode waktu tertentu. Data ini juga dapat digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), perkembangan investasi fisik (ICOR), kajian ekspor dan impor, dan sebagainya.

Penghitungan PDRB dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/*expenditure*), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*).

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB dengan pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), dan Net Ekspor Barang dan Jasa. Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010 dan sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* sesuai rekomendasi *United Nations*.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan diucapkan terima kasih. Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Karena itu, masukan yang konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan publikasi selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Koba, April 2022  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Bangka Tengah,

**Ir. Rizanal Mahmudin**



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB .....	5
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) .....	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) .....	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	18
2.5 Perubahan Inventori.....	22
2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa .....	25
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGKA TENGAH MENURUT PDRB PENGELUARAN, 2017-2021 .....	29
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran.....	31
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	36
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT .....	39
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	40
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	42
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori .....	44
3.7 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa .....	466
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN BANGKA TENGAH 2017-2021 .....	49
4.1 PDRB (Nominal) .....	51
4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB.....	533
4.3 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB .....	533
4.4 Neraca Perdagangan ( <i>Trade Balance</i> ) .....	555
4.5 <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> .....	566
BAB V PENUTUP .....	609
LAMPIRAN .....	653





## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (miliar rupiah), 2017-2021.....	32
Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (miliar rupiah), 2017-2021.....	32
Tabel 3.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021.....	34
Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021.....	34
Tabel 3.5 Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021.....	35
Tabel 3.6 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021.....	37
Tabel 3.7 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021.....	39
Tabel 3.8 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021.....	41
Tabel 3.9 Perkembangan PMTB Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021.....	43
Tabel 3.10 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021.....	455
Tabel 3.11 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021.....	46
Tabel 4. 1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021.....	522
Tabel 4. 2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021.....	533
Tabel 4. 3 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021.....	544
Tabel 4. 4 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021.....	555
Tabel 4. 5 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021.....	566





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (miliar rupiah), 2017-2021.....	33
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Indeks Implisit Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021.....	36
Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021.....	38
Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi LNPRT Terhadap PDRD Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021.....	40
Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021.....	41
Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan dan Peranan PMTB Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021.....	444
Gambar 3.7 Peranan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021.....	45
Gambar 4. 1 PDRB Perkapita Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (ribu rupiah), 2017-2021 .....	51
Gambar 4. 2 Nilai Konsumsi Akhir (miliar rupiah) dan Peranan Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021 .....	544





## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2017-2021 .....	63
Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2017-2021 .....	64
Lampiran 3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2017-2021....	65
Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2017-2021	66
Lampiran 5 Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2017-2021 .....	67

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>



# BAB 1



## PENDAHULUAN







# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat wilayah sebagai indikator penting untuk memonitor perekonomian secara makro. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dari angka PDRB dapat digambarkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, perubahan struktur ekonomi, pendapatan perkapita, konsumsi, investasi, dan variabel ekonomi makro lainnya. Dalam perkembangannya, PDRB sudah dijadikan sebagai tolok ukur bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain untuk melakukan evaluasi keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah.

PDRB dinilai menggunakan dua pendekatan, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan PDRB tipe ini sangat bermanfaat untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Penyusunan PDRB dapat menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu menurut pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran.

### A. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan



Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

### **B. Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

### **C. Menurut Pendekatan Pengeluaran**

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Penyusunan PDRB terus mengalami penyempurnaan terutama dari segi cakupan data dan metodologi penghitungan yang digunakan. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan yang menggunakan tahun dasar tahun tertentu, diganti sesuai dengan pertimbangan kondisi ekonomi Indonesia dan mengikuti saran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengubah tahun dasar setiap 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, 2000, dan 2010. Mulai tahun 2015 digunakan tahun dasar yang baru yaitu tahun 2010. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan sebagai berikut:

- Perekonomian Indonesia relatif stabil

- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru
- Rekomendasi PBB tentang perubahan tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun
- Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index/PPI*)
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking*/menetapkan PDB.

## 1.2 Kegunaan Statistik PDRB

Data pendapatan PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Dari perhitungan PDRB ADHB dan ADHK diperoleh tabel turunan PDRB seperti: distribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, indeks implisit, dan PDRB per kapita. Manfaat yang dapat diperoleh dari data-data tersebut antara lain adalah:

- PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
- PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
- Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
- PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
- PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.



# BAB 11



## METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA





## **BAB II**

### **METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA**

#### **2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)**

Sektor institusi dalam total ekonomi dikelompokkan ke dalam lima sektor, yaitu: korporasi finansial, korporasi non finansial, pemerintahan umum, rumah tangga, dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRRT). Sektor rumah tangga mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan nilai konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

##### **A. Konsep dan Definisi**


Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993).

##### **B. Cakupan**

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut 12 COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

- a) Makanan dan minuman non alkohol
- b) Minuman beralkohol dan rokok
- c) Pakaian dan alas kaki
- d) Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lain
- e) Furnitur, peralatan rumah tangga, dan perbaikan rutin rumah
- f) Kesehatan
- g) Transportasi/angkutan
- h) Komunikasi



- 
- i) Rekreasi dan kebudayaan
  - j) Pendidikan
  - k) Penginapan, hotel, dan restoran
  - l) Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:


- a) Makanan, Minuman, dan Rokok
- b) Pakaian dan Alas Kaki
- c) Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- d) Kesehatan dan Pendidikan
- e) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- f) Hotel dan Restoran
- g) Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);  
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi



rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

## C. Penghitungan PK-RT Tahunan

### 1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi besarnya PK-RT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk kelompok makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (baik dari BPS maupun luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS.


### 2) Metode Penghitungan

Penghitungan PK-RT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PK-RT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditas tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PK-RT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PK-RT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dilakukan menggunakan metode deflasi yaitu dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB masing-masing kelompok COICOP dengan IHK tahun dasar 2010 dari masing-masing kelompok COICOP yang sesuai.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah dalam penghitungan PK-RT dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Estimasi PK-RT hasil Susenas:

- 
- i) Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x  $(30/7)$  x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
  - ii) Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
- b. Terhadap data poin a dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
  - c. Data poin b dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
  - d. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
  - e. Susun indeks implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
  - f. PK-RT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin d dengan hasil poin e.

## 2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)


Sektor Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### A. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui



kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi sosial (orsos), organisasi profesi (orprof), perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa (OBK).

## **B. Cakupan**

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- Konsumsi antara, contohnya: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.
- Kompensasi tenaga kerja, contohnya: upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lainnya
- Penyusutan
- Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contohnya: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

## **C. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan**

### **1) Sumber Data**

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)  
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *updating* direktori LNPRT  
Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

### **2) Metode Penghitungan**

Metode estimasi PK-LNPRT menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$ : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$x_{ij}$ : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$n_i$ : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

$i$ : Jenis lembaga LNPRT,  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

$j$ : jenis pengeluaran LNPRT,  $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$


$X$ : PK-LNPRT ADHB

$N_i$ : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dilakukan menggunakan metode deflasi yaitu dengan cara *men-deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

### 2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non pasar.



Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir, sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

### **A. Konsep dan Definisi**

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.


Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi, dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditi (pendapatan jasa).

### **B. Cakupan**

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten/Kota mencakup : a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah



Kabupaten/Kota; d. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- Pengeluaran konsumsi pemerintah untuk individu, merupakan pengeluaran yang diberikan kepada individu (jasa kesehatan, pendidikan, *social security*, *sports*, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya)
- Pengeluaran konsumsi untuk kolektif, merupakan pengeluaran pemerintah untuk penduduk secara keseluruhan barang publik (administrasi publik, pertahanan, keamanan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi, *Resource and Development*, dan sebagainya).

Pengeluaran pemerintah meliputi:

- Administrasi umum
- Pelayanan pemerintah (gratis atau hampir gratis) seperti pendidikan, kesehatan serta jasa lainnya
- Lembaga non profit yang utamanya dikontrol dan dibiayai oleh pemerintah
- Pengeluaran pemerintah sebagai transfer berupa barang
- Belanja/pembelian makanan/minuman oleh pemerintah untuk membantu korban bencana.

Klasifikasi ekonomi konsumsi akhir pemerintah meliputi:

- Konsumsi antara
- Balas jasa tenaga kerja
- Konsumsi barang modal
- Penjualan (output pasar/market output)
- Transfer berupa barang
- *Own account capital formation*
- *Gross capital formation (purchased) Subsidies*
- *Property income*
- *Social benefits other than in kind*
- Transfer berjalan lainnya
- Transfer modal/*capital*

## C. Penghitungan PK-P Tahunan

### 1) Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)



- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu atau DPPKAD Provinsi/Kabupaten/ Kota)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan
- IHPB umum tanpa ekspor, indeks upah, indeks implisit PMTB, dan IHK umum dari BPS.

## 2) Metode Penghitungan

### a. PKP Kabupaten/Kota ADHB

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten/kota, PK-P Kabupaten/Kota ADHB dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut + pengeluaran pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

### b. PK-P Kabupaten/Kota ADHK

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.



## 2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB merupakan nilai arus barang modal yang terjadi akibat penambahan barang modal baru dikurangi pengurangan barang modal bekas, ditambah perbaikan besar atas barang modal atau aset tetap dan biaya transfer/pemindahan kepemilikan atas aset-aset yang tidak diproduksi. Sementara perubahan inventori merupakan perubahan kuantitas bahan baku, penolong, barang jadi dan setengah jadi maupun suku cadang yang dikuasai oleh perusahaan.


PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Aset tetap merupakan aset penting yang menunjang kegiatan produksi yang digunakan berulang kali atau berkelanjutan dalam proses produksi lebih dari satu tahun dan bernilai relatif mahal. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

Penambahan aset tetap atau yang dikenal sebagai PMTB pada prinsipnya diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh pada suatu kegiatan ekonomi, sehingga penghitungan PMTB menjadi sangat penting untuk mengukur efisiensi yang dicapai oleh suatu aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

### A. Konsep dan Definisi

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sementara pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Sebagai pengecualian, kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption*



*of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

## **B. Cakupan**


Dalam publikasi ini, PMTB dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Bangunan dan Non bangunan. PMTB terdiri dari:

- Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, sistem persenjataan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan hutan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

## **C. Penghitungan PMTB Tahunan**

### **1) Sumber Data**

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Hasil Survei Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah dari BPS.
- c. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- d. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Direktorat Statistik Industri (pada level provinsi).
- e. Laporan keuangan perusahaan.
- f. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- g. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- h. Publikasi Statistik Pertambangan dan Pengalihan.
- i. Publikasi Statistik Listrik, Gas, dan Air Minum.
- j. Publikasi Statistik Konstruksi.
- k. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Dinas Pertambangan dan Energi.
- l. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

- 
- m. Statistik Perkebunan, Ditjen Perkebunan.
  - n. Statistik Kendaraan Bermotor, Samsat.
  - o. Statistik Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

## 2) Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sementara pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau suplai dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).


### a. Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK digunakan metode deflasi yaitu dengan cara PMTB ADHB tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

### b. Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (suplai), yang kemudian sebagian diantaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB




dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. *Pertama*, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK digunakan metode deflasi yaitu dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan *kedua*, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikasikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB digunakan metode produksi dengan cara nilai PMTB ADHK tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkut, dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADHK menggunakan metode deflasi yaitu dengan cara men-*deflate* PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sementara PMTB ADHK-nya diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.



Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk ADHK diperoleh dengan metode deflasi dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sementara data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK-nya diperoleh menggunakan metode deflasi dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.


## 2.5 Perubahan Inventori

Inventori dalam ekonomi makro dapat diartikan sebagai sub komponen investasi sedangkan dalam ekonomi mikro, inventori dapat diartikan sebagai komponen aset atau harta lancar perusahaan. Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### A. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk



dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sementara bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

## **B. Cakupan**

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- Ternak untuk tujuan dipotong;
- Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.



## C. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

### 1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan atau Dinas Pertanian.

### 2) Metode Penghitungan


Ada 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara lebih rinci dan berkesinambungan.

#### a. Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADHB, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori ADHK menggunakan metode deflasi dengan cara *deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan



dengan di tahun sebelumnya; dan

- menghitung perubahan inventori ADHB dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan.

#### **b. Pendekatan Tidak Langsung**

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen perubahan inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

## **2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa**

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari luar daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring dengan adanya perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi





tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

### **A. Konsep dan Definisi**

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Pada dasarnya metode pengukuran jenis transaksi eksternal (baik antar negara maupun antar daerah) memiliki kesamaan prinsip, dalam artian yang satu akan menambah jumlah PDRB dan yang lainnya akan mengurangi jumlah PDRB. Perbedaan yang sangat mendasar adalah dalam hal penilaian, karena menyangkut alat pembayaran.

### **B. Cakupan**

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut
- Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

- Net Ekspor antar daerah
  - Ekspor antar daerah
  - Impor antar daerah


### **C. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan**

#### **1) Sumber Data**

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

#### **2) Metode Penghitungan**

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri ADHB dilakukan dengan mengalikan nilai



barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sementara Impor barang luar negeri ADHB dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sementara net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran. Penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri ADHK dilakukan dengan metode deflasi, dengan IHPB menurut jenis barang untuk ekspor-impor barang luar negeri dan IHK jasa untuk ekspor impor jasa luar negeri sebagai deflatornya.

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>



# BAB III



TINJAUAN PEREKONOMIAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
MENURUT PDRB PENGELUARAN, 2017-2021





## **BAB III**

### **TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGKA TENGAH MENURUT PDRB PENGELUARAN, 2017-2021**

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Bangka Tengah akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2017 hingga 2021, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan kegiatan perdagangan. Khusus untuk 2020-2021, pandemi covid-19 menjadi faktor eksternal yang paling berpengaruh pada perekonomian Bangka Tengah. Dalam bab ini akan dibahas tinjauan perekonomian Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan pendekatan PDRB menurut pengeluaran.

Setiap komponen pengeluaran yang mencakup konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRRT, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Bangka Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Perilaku setiap komponen pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran**

PDRB menurut pengeluaran menjelaskan bagaimana pendapatan yang diciptakan dalam proses ekonomi dari berbagai sektor produksi digunakan masyarakat untuk konsumsi akhirnya. Dengan kata lain, PDRB menurut pengeluaran menjelaskan mengenai penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir atau output final (*final output*). Pengguna konsumsi akhir ini adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga-lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi di wilayah domestik.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah digambarkan melalui agregat PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan tren yang fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang dahsyat melanda hampir seluruh lapangan usaha dan berdampak hampir ke seluruh penjuru dunia. Awal 2022 menandai kebangkitan pasca badai covid-19 yang melanda pada 2020-2021. Tentu saja 2022 juga masih diwarnai dengan kejadian-

kejadian covid-19, namun tidak separah dua tahun sebelumnya. Peningkatan ekonomi dapat dilihat dari terjadinya pembangunan ekonomi, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melebihi tingkat pertumbuhan penduduk atau suatu proses meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang.

**Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (miliar rupiah), 2017-2021**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5 505	5 988	6 550	6 531	6 811
2. Konsumsi LNPRT	63	68	77	79	83
3. Konsumsi Pemerintah	1 037	1 090	1 156	1 157	1 210
4. PMTB	2 192	2 443	2 768	2 582	2 692
5. Perubahan Inventori	28	30	35	4	6
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-853	-1 405	-2 020	-1 920	-1 470
<b>PDRB</b>	<b>7 972</b>	<b>8 213</b>	<b>8 567</b>	<b>8 433</b>	<b>9 333</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Pada tabel 3.1 dapat diketahui jika pada periode 2017-2021, PDRB atas dasar harga berlaku memiliki tren meningkat, kecuali pada 2020 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2017, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bangka Tengah sebesar 7.972 miliar rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 9.333 miliar rupiah. Jika dilihat per komponen, maka konsumsi rumah tangga memiliki sumbangsih terbesar terhadap PDRB ADHB. Pada tahun 2017, konsumsi rumah tangga menyumbang 5.505 miliar rupiah terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tengah dan meningkat menjadi 6.811 miliar rupiah pada tahun 2021.

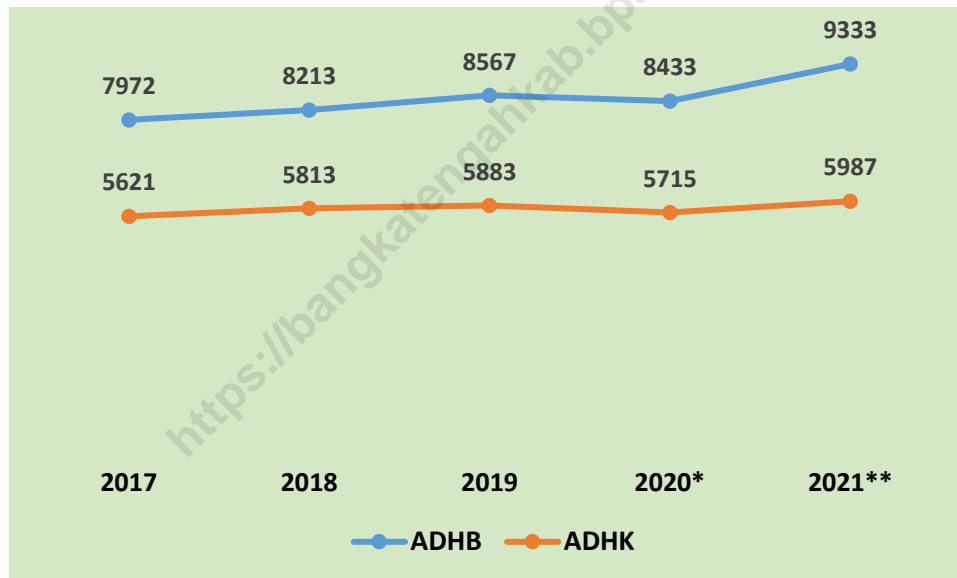
**Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (miliar rupiah), 2017-2021**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 645	3 833	4 013	3 978	4 100
2. Konsumsi LNPRT	41	44	49	50	51
3. Konsumsi Pemerintah	651	668	683	661	688
4. PMTB	1 335	1 430	1 555	1 448	1 481
5. Perubahan Inventori	27	31	36	6	9
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-78	-194	-454	-427	-342
<b>PDRB</b>	<b>5 621</b>	<b>5 813</b>	<b>5 883</b>	<b>5 715</b>	<b>5 987</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 (ADHK 2010). Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB ADHK menurut pengeluaran menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama tahun 2017-2021, hampir seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2017 adalah sebesar 5.621 miliar rupiah, meningkat menjadi 5.987 miliar rupiah pada tahun 2021.

**Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (miliar rupiah), 2017-2021**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Semakin lama perbedaannya semakin besar. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Semakin besarnya perbedaan PDRB ADHB dan PDRB ADHK mengindikasikan bahwa kenaikan harga yang terjadi lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB tersebut.

Pembentukan PDRB tidak terlepas dari kontribusi semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPR (PKLNPR), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta net ekspor barang dan jasa atau ekspor dikurangi impor. Pada tabel 3.3 terlihat



bahwa selama periode 2017-2021, produk barang dan jasa yang dihasilkan sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (pada 5 tahun terakhir selalu di atas 50 persen. Jika dilihat pada table 3.3, hampir seluruh komponen pengeluaran memiliki distribusi/peranan yang berfluktuasi tiap tahun, kecuali komponen pengeluaran pemerintah yang terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir.

**Tabel 3.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	69,05	72,90	76,46	77,45	72,98
2. Konsumsi LNPRT	0,79	0,83	0,90	0,93	0,89
3. Konsumsi Pemerintah	13,00	13,27	13,50	13,72	12,96
4. PMTB	27,50	29,74	32,31	30,61	28,85
5. Perubahan Inventori	0,36	0,37	0,41	0,05	0,07
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-10,70	-17,11	-23,58	-22,76	-15,75
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 27-32 persen. Kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada kisaran 12-13 persen, selalu meningkat setiap tahunnya. Namun, kontribusi yang tidak begitu besar ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar, masih berada di bawah kontribusi konsumsi rumah tangga dan PMTB. Sementara itu, komponen yang peranannya paling kecil adalah konsumsi LNPRT, dimana kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Bangka Tengah berkisar antara 0,79 persen sampai dengan 0,93 persen selama kurun waktu 2017-2021.

**Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,25	5,16	4,71	-0,89	3,07
2. Konsumsi LNPRT	6,39	7,42	11,79	0,31	3,56
3. Konsumsi Pemerintah	5,43	2,66	2,24	-3,32	4,13
4. PMTB	4,73	7,15	8,71	-6,89	2,29
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>3,46</b>	<b>3,42</b>	<b>1,21</b>	<b>-2,86</b>	<b>4,76</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Agregat makro lainnya yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah, rumah tangga, pengusaha, dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor. Selama tahun 2017-2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan peningkatan hingga tahun 2018 dan mengalami perlambatan pada 2019. Lalu secara mengejutkan mengalami kontraksi pada 2020 akibat pandemi yang juga dirasakan hampir di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung. Pada 2021, perekonomian mulai bangkit bahkan mencatat pertumbuhan tertinggi sejak 2013. Hal ini disebabkan oleh basis yang rendah pada 2020 dan secara perlahan seluruh sendi-sendi perekonomian mulai bergerak maju.

Selain pertumbuhan ekonomi, agregat makro lainnya yang penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi adalah inflasi/deflasi. Kenaikan perubahan harga yang terjadi di masyarakat disebut dengan inflasi, sedangkan perubahan harga yang menurun disebut dengan deflasi. Tingginya perubahan harga atau inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat.

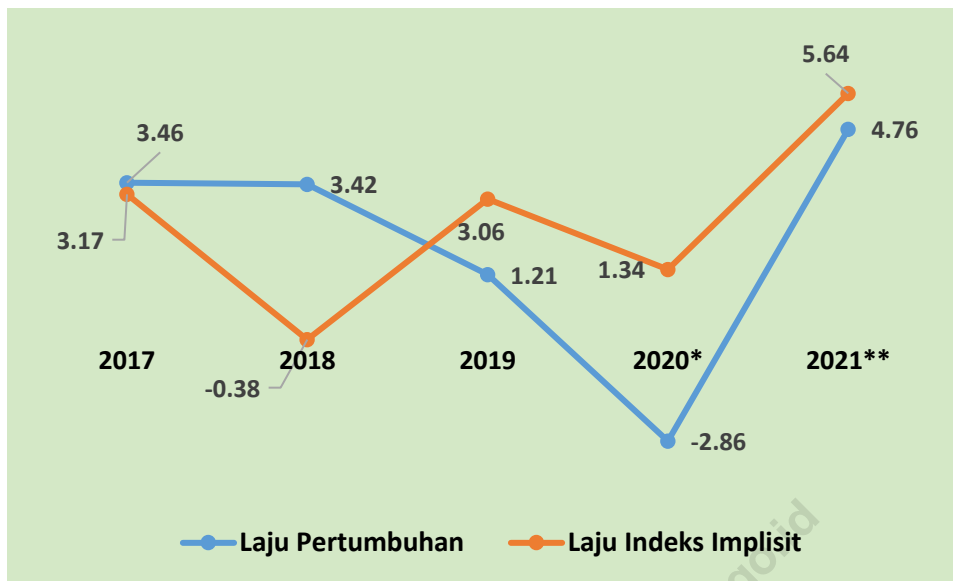
**Tabel 3.5 Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,82	3,43	4,47	0,61	1,18
2. Konsumsi LNPRT	4,93	0,48	1,75	1,25	2,48
3. Konsumsi Pemerintah	2,56	2,43	3,75	3,50	0,41
4. PMTB	6,22	3,99	4,22	0,17	1,95
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>3,17</b>	<b>-0,38</b>	<b>3,06</b>	<b>1,34</b>	<b>5,64</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Penghitungan PDRB menghasilkan tingkat perubahan harga yang dikenal dengan *deflator* PDRB. *Deflator* PDRB didasarkan pada penghitungan yang mengandung seluruh barang yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga *deflator* PDRB merupakan indeks harga yang berbasis luas yang seringkali digunakan untuk mengukur inflasi.

**Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan dan Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Perubahan harga untuk berbagai komponen PDRB menurut pengeluaran dapat diukur dengan laju indeks implisit. Indeks implisit pada PDRB menurut pengeluaran merupakan perbandingan antara komponen-komponen PDRB atas dasar harga berlaku dengan harga konstan 2010. Laju indeks implisit PDRB yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPR, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) selama tahun 2017-2021 memiliki nilai yang cenderung positif dengan besaran yang berfluktuatif setiap tahunnya. Laju indeks implisit bernilai negatif di tahun 2018 dengan nilai -0,34 persen. Nilai laju implisit positif menunjukkan terjadinya peningkatan harga, begitu juga sebaliknya. Nilai laju indeks implisit tertinggi selama kurun waktu 2017-2021 di Kabupaten Bangka Tengah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,64 persen sedangkan nilai laju implisit terendah terjadi pada tahun 2018.

### 3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah menurut pengeluaran. Sebagian besar produk barang dan jasa yang tercipta digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Selama tahun 2017-2021, perkembangan konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan). Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga.

Peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya peningkatan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 3.6 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021**

<b>U r a i a n</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga (RT)					
a. ADHB (miliar rupiah)	5 505	5 988	6 550	6 531	6 811
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	3 645	3 833	4 013	3 978	4 100
Proporsi Terhadap PDRB ( % ADHB)	69,05	72,90	76,46	77,45	72,98
Rata-Rata Konsumsi Perkapita/Tahun (Juta rupiah)					
a. ADHB					
b. ADHK 2010	19,33	19,92	20,99	20,07	20,31
Pertumbuhan (%)					
a. Konsumsi RT	5,25	5,16	4,71		
b. Konsumsi perkapita	3,03	3,51	2,56		
Jumlah Penduduk (000 orang)	189	192	191	198	202

*Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara*

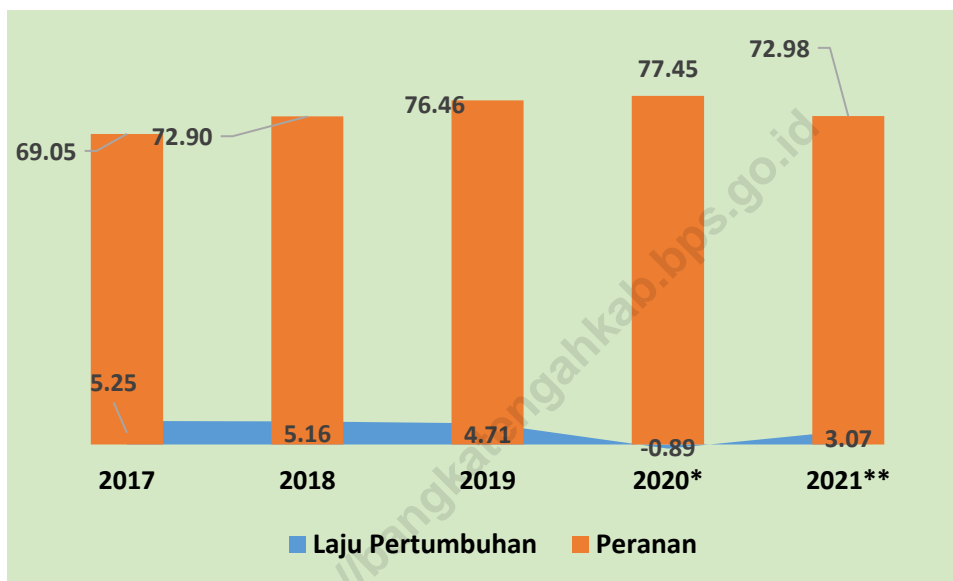
Tabel 3.6 menunjukkan bahwa porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 61,37 persen dan meningkat menjadi 76,34 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019, nilai komponen konsumsi rumah tangga adalah sebesar 6.550 miliar rupiah, mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang sebesar 4.330 miliar rupiah.

Membaiknya perkembangan ekonomi yang terjadi telah mendorong pendapatan dari rumah tangga ikut membaik, hal ini berdampak terhadap perbaikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 selama kurun waktu lima tahun terakhir. Secara nominal, satu orang di Kabupaten Bangka Tengah selama periode tahun 2017-2021 mengalami peningkatan pengeluaran setiap tahunnya. Pada tahun 2015 satu orang menghabiskan dana sekitar 23,92 juta rupiah untuk membiayai konsumsi baik dalam

bentuk makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 33,42 juta rupiah pada tahun 2019. Sementara itu, dilihat dari pertumbuhan selama periode tahun 2017-2021, rata-rata konsumsi rumah tangga per orang tumbuh pada kisaran antara 4-7 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,79 persen. Pertumbuhan menurun dari tahun 2017 hingga 2019 yang pertumbuhannya menjadi 4,71 persen di tahun 2019.

**Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Berdasarkan gambar 3.3 dapat diketahui gambaran laju pertumbuhan dan peranan konsumsi rumah tangga di Bangka Tengah dari 2017 hingga 2021. Secara umum, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh positif, kecuali pada 2020. Namun pertumbuhan positif yang terjadi cenderung melambat, bahkan terjadi kontraksi pertumbuhan konsumsi perkapita pada 2020 yaitu sebesar -0,89 persen setelah tahun sebelumnya tumbuh positif sebesar 4,71 persen dikarenakan hancurnya perekonomian akibat pandemi covid-19 dimana banyak masyarakat kehilangan kemampuan konsumsinya karena kehilangan mata pencaharian. Pada 2021, pertumbuhan konsumsi penduduk kembali melaju positif sebesar 3,07 persen namun masih lebih lambat dibandingkan periode 2017-2019.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi rumah tangga juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

Peranan konsumsi rumah tangga dalam PDRB Pengeluaran cukup tinggi dan cenderung meningkat dari 2017 ke 2020, dan sedikit menurun pada 2021. Selama periode 2017-2020, peranan konsumsi rumah tangga terhadap PDRB meningkat dari 69,05 persen menjadi 77,45 persen, lalu turun menjadi 72,98 persen pada 2021. Peranan tertinggi ini dikarenakan masih tingginya konsumsi masyarakat dan kebutuhan yang terus meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga inflasi yang turut mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

### 3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Dari berbagai komponen pembentuk PDRB menurut pengeluaran, konsumsi akhir LNPRT merupakan komponen yang mempunyai kontribusi terkecil. Selama periode 2017-2021, kontribusinya di bawah 1 persen. Kecilnya nilai kontribusi ini disebabkan aktivitas lembaga sosial, kemasyarakatan, organisasi profesi, politik, dan sejenisnya di Kabupaten Bangka Tengah masih berskala kecil. Untuk itu, peran lembaga non profit perlu ditingkatkan yang sudah ada perlu ditingkatkan agar memberikan kontribusi yang lebih besar. Pada saat ini telah ada berbagai upaya masyarakat serta sosialisasi di lingkungan masyarakat itu sendiri, yang bertujuan untuk ikut serta dalam proses pembangunan, khususnya di bidang sosial kemasyarakatan.

**Tabel 3.7 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021**

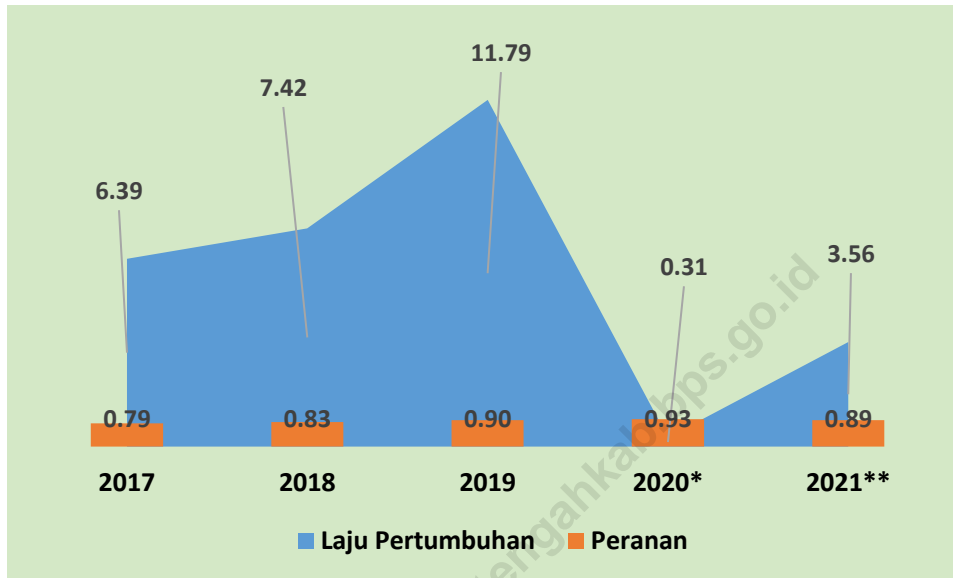
Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (miliar rupiah)	63	68	77	79	83
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	41	44	49	50	51
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	0,79	0,83	0,90	0,93	0,89

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Meskipun memiliki kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah, tetapi peranan konsumsi LNPRT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir, walaupun sedikit menurun pada 2021. Namun secara nominal, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT terus meningkat dari 63 miliar rupiah pada 2017 menjadi 83 miliar rupiah pada 2021. Peranan yang diciptakan oleh komponen konsumsi LNPRT pada tahun 2021 adalah sebesar 0,89 persen, sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,93 persen, namun masih lebih tinggi dibandingkan 2017-

2018. Demikian halnya dengan nilai konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan dari 41 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 51 miliar rupiah pada tahun 2021. Secara rata-rata, selama kurun waktu 2017-2021, nilai konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Tengah meningkat sebesar 5,89 persen setiap tahunnya.

**Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi LNPRT Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Secara riil, laju pertumbuhan komponen konsumsi LNPRT ini berfluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir, berkisar antara 0,93-11,79 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 11,79 persen. Pada 2019 diselenggarakan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) yang menyebabkan laju pertumbuhan konsumsi LNPRT meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tumbuh sebesar 4,37 persen.

### 3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan ekonomi di suatu wilayah adalah permintaan pemerintah atas barang dan jasa yang dihasilkan seluruh faktor produksi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah bisa terjadi karena adanya peningkatan permintaan pemerintah atas barang dan jasa yang dihasilkan seluruh faktor produksi wilayah tersebut. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Bangka Tengah serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Selama tahun 2017-2021, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada 2017,



total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 1.037 miliar rupiah, mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada 2021 mencapai 1.210 miliar rupiah.

**Tabel 3.8 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (miliar rupiah)	1 037	1 090	1 156	1 157	1 210
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	651	668	683	661	688
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	13,00	13,27	13,50	13,72	12,96

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Demikian pula halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2017, pengeluaran akhir konsumsi pemerintah adalah sebesar 651 miliar rupiah lalu meningkat menjadi 688 miliar rupiah pada tahun 2021. Secara rata-rata, peningkatan konsumsi pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 2,23 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas selama kurun waktu tersebut.


**Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Peranan yang disumbangkan oleh komponen konsumsi pemerintah selama kurun waktu 2017-2020 menunjukkan peningkatan perlahan setiap tahunnya, dari 13 persen pada 2017





menjadi sebesar 13,72 persen pada 2020, namun sedikit menurun pada 2021 menjadi 12,96 persen.

Gambaran tentang peningkatan konsumsi akhir pemerintah secara riil merupakan pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Besarnya nilai konsumsi akhir pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2017-2021 dikarenakan sebagian kantor pemerintah provinsi terletak di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Pada gambar 3.5 dapat dilihat bahwa pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah bergerak fluktuatif namun cenderung mengalami perlambatan. Pada 2017, laju pertumbuhan sebesar 5,43 persen dan menurun agak curam menjadi 2,66 persen pada 2018. Lalu kembali melandai pada 2019 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,44 persen. Pada 2020, pandemic membuat konsumsi akhir pemerintah berkontraksi ke -3,32 persen dikarenakan pemerintah melakukan relokasi anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi. Setelah memasuki 2021, tampaknya pemerintah mulai optimis dapat mengatasi badai covid-19 yang sudah terjadi beberapa gelombang dan mulai meningkatkan laju pertumbuhan konsumsi akhirnya.

### **3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Perkembangan pembangunan wilayah secara makro tidak terlepas dari perkembangan investasi. Investasi mempunyai keterkaitan dengan kelangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan investasi maka kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti adanya peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan (*income*). Dalam waktu yang panjang investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). PMTB dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik/kapital (selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga memiliki proporsi sekitar 24-32 persen terhadap total PDRB dan

menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Pada tahun 2015, nilai PMTB Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 1.697 miliar rupiah, memberikan peranan sebesar 24,06 persen terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah. Nilai PMTB mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2019 mencapai nilai sebesar 2.772 miliar rupiah atau memberikan peranan sebesar 32,31 persen terhadap total PDRB, peranan yang cukup besar.

**Tabel 3.9 Perkembangan PMTB Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021**

<b>U r a i a n</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<b>PMTB</b>					
a. ADHB (miliar rupiah)	2 192	2 443	2 768	2 582	2 692
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	1 335	1 430	1 555	1 448	1 481
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	27,50	29,74	32,31	30,61	28,85

*Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara*

Secara riil, selama tahun 2017-2021, PMTB mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,20 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,71 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 karena mengalami kontraksi sebesar -6,89 persen. Nilai PMTB secara riil atau yang dihitung atas dasar harga konstan pada tahun 2017 adalah sebesar 1.335 miliar rupiah, mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga 2019 mencapai 1.555 miliar rupiah. Pada 2020, nilai PMTB riil turun menjadi 1.448 miliar rupiah yang disebabkan fokus pembangunan yang beralih pada penanganan covid-19, selain itu banyak unit usaha yang jangankan untuk membangun atau membentuk modal tetap, untuk bertahan di tengah badai pandemi pun mereka tidak mampu. Setelah satu tahun yang suram, 2021 perlahan mulai ada peningkatan PMTB riil sehingga menjadi sebesar 1.481 miliar rupiah.

**Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan dan Peranan PMTB Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

### 3.6 Perkembangan Perubahan Inventori

Inventori dalam ekonomi makro dapat diartikan sebagai persediaan barang pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan sejenisnya. Sedangkan dalam ekonomi mikro, inventori dapat diartikan sebagai persediaan bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi/barang jadi, suku cadang, barang dalam perjalanan dan sejenisnya. Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 3.10 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021**

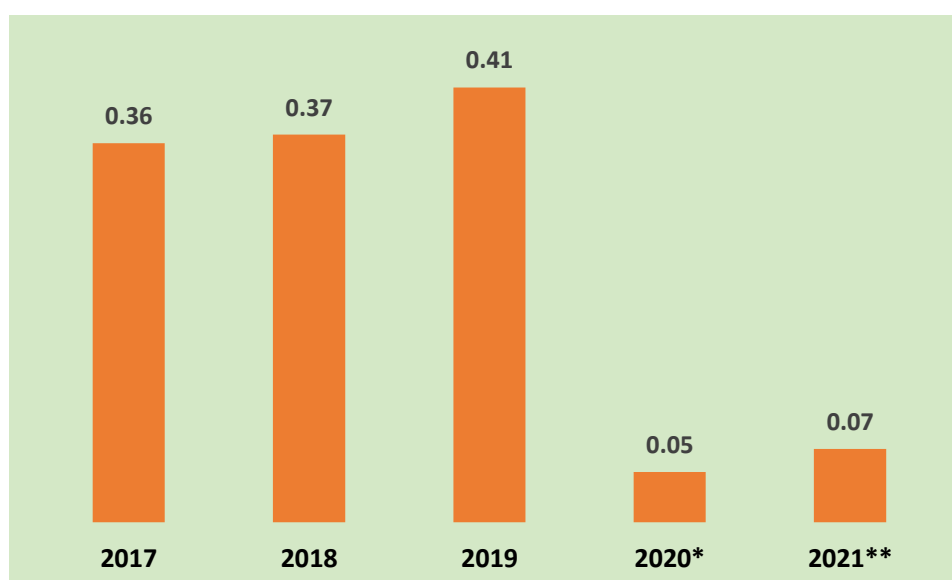
Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perubahan Inventori</b>					
a. ADHB (miliar rupiah)	28	30	35	4	6
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	27	31	36	6	9
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	0,36	0,37	0,41	0,05	0,07

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori saat ini hanya dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai perubahan inventori cenderung mengalami fluktuasi, baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2017, nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku adalah sebesar 28 miliar rupiah. Adapun pada tahun 2021, nilai perubahan inventori Kabupaten Bangka Tengah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 6 miliar rupiah.

**Gambar 3.7 Peranan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara



Selama tahun 2017-2021, proporsi perubahan inventori terhadap PDRB berkisar antara 0,05 hingga 0,41 persen. Peranan perubahan inventori terhadap PDRB Kabupaten Bangka tertinggi terjadi pada 2019 dan terendah pada 2020. Seiring dengan menurunnya persediaan timah dan hasil industri logam timah di Kabupaten Bangka Tengah dan ditutupnya salah satu perusahaan timah di Kabupaten Bangka Tengah, proporsi perubahan inventori terhadap PDRB juga semakin menurun. Proporsi perubahan inventori yang berada pada kisaran 1 persen menunjukkan distribusi atau pemasaran di Kabupaten Bangka Tengah masih berjalan dengan baik, di mana salah satu penyumbang terbesar dalam perubahan inventori tersebut adalah komoditas ekspor seperti timah, CPO, karet dan lainnya.

### 3.7 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa


Peran perdagangan antar wilayah cukup penting dalam perekonomian suatu daerah. Jenis produksi barang dan jasa yang saling melengkapi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya kegiatan transaksi ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan domestiknya secara penuh akan berusaha mendatangkan barang dan jasa dari daerah/negara lain. Pada sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa yang melebihi kebutuhan domestik juga terdorong untuk memperluas pemasarannya ke luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, maka produksi dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa juga semakin meningkat, kemajuan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi juga semakin memungkinkan distribusi barang dan jasa di kabupaten/kota semakin berkembang.

**Tabel 3.11 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021**

U r a i a n	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Net Ekspor Barang dan Jasa</b>					
a. ADHB (miliar rupiah)	-853	-1 405	-2 020	-1 920	-1 470
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	-78	-194	-454	-427	-342
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	-10.70	-17.11	-23.58	-22.76	-15.75

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara



Perkembangan net ekspor barang dan jasa selama 2017-2021 cukup berfluktuatif, tapi satu hal yang bisa kita lihat dengan jelas adalah bahwa sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir, net ekspor Kabupaten Bangka Tengah baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekspor yang kita lakukan jauh lebih kecil dibandingka nilai impor. Ini juga menunjukkan bahwa output yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di Kabupaten Bangka Tengah masih belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, konsumsi akhir pemerintah, dan juga pe,bentukan modal tetap bruto.

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>



# BAB IV



PERKEMBANGAN AGREGAT  
PDRB MENURUT PENGELUARAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 2017-2021





## BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN BANGKA TENGAH 2017-2021

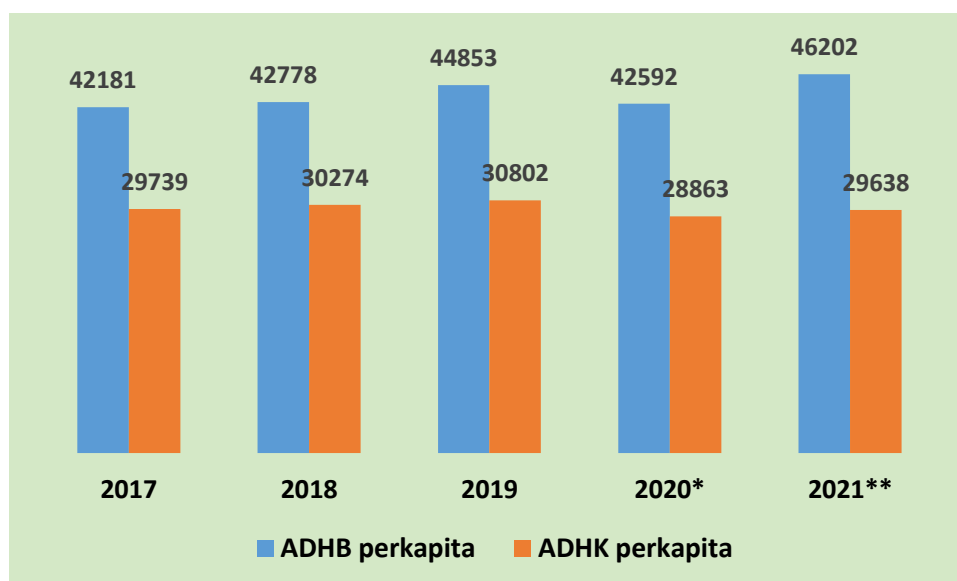
Dalam analisis sosial ekonomi, penggunaan data PDRB sebagai indikator ekonomi makro sering dilakukan di tengah keterbatasan informasi yang tersedia. Dari data PDRB dapat menghasilkan beberapa rasio (perbandingan relatif) untuk melengkapi analisis yang ada, seperti disajikan pada uraian berikut ini.

### 4.1 PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

PDRB yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran akan menghasilkan data PDRB menurut pengeluaran. Dari series data PDRB menurut pengeluaran tersebut dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita.

**Gambar 4. 1 PDRB Perkapita Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (ribu rupiah), 2017-2021**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

**Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Tengah, 2018-2021**

Uraian	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (miliar rupiah)				
a. ADHB	8 213	8 567	8 433	9 333
b. ADHK 2010	5 813	5 883	5 715	5 987
PDRB perkapita (ribu rupiah)				
a. ADHB	42 778	44 853	42 592	46 202
b. ADHK 2010	30 274	30 802	28 863	29 638
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	1,80	1,74	-6,29	2,69
Jumlah Penduduk (000 orang)	192	191	198	202
Pertumbuhan (%)	1,59	-0,52	3,66	2,02

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Perkembangan penduduk yang hampir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kondisi tersebut berdampak terhadap perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bangka Tengah. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2018-2021 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Secara nominal, PDRB perkapita pada tahun 2018 sebesar 42,78 juta rupiah dan di tahun 2021 meningkat menjadi 46,20 juta rupiah. Sementara itu, perkembangan PDRB perkapita secara riil menunjukkan fluktuasi selama kurun waktu empat tahun terakhir.

#### 4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 yang menyajikan perbandingan konsumsi rumah tangga dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam kurun waktu 2017-2021. secara rata-rata rasio yang tercipta diatas 2. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang tersedia (*supply*) lebih banyak digunakan untuk memenuhi permintaan akhir rumah tangga sekitar 2 kali daripada permintaan untuk investasi fisik (PMTB). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Tengah merupakan daerah berkembang dengan tingkat konsumsi rumah tangga di atas investasi.

**Tabel 4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021**

<b>U r a i a n</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	5 505	5 988	6 550	6 531	6 811
PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	3 645	3 833	4 013	3 978	4 100
Perbandingan Konsumsi RT Terhadap PMTB	1,51	1,56	1,63	1,64	1,66

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Selama kurun waktu 2017-2021, perkembangan rasio mengalami peningkatan setiap tahunnya, kondisi ini menandakan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga lebih cepat dibandingkan permintaan untuk investasi fisik (PMTB).

#### 4.3 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB

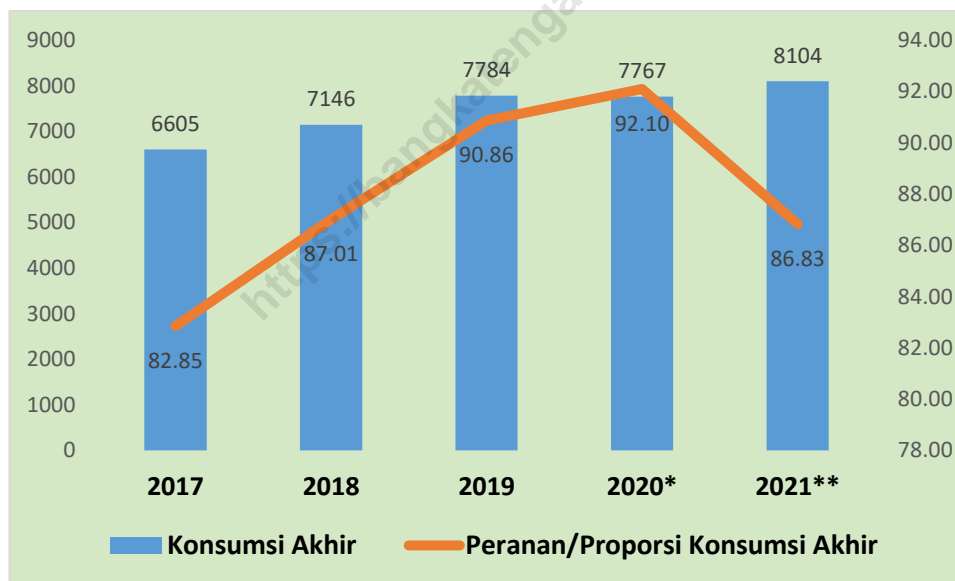
Konsumsi akhir merupakan penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari domestik maupun impor) dalam menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 4.3 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar rupiah)</b>					
a. Rumah Tangga	5 505	5 988	6 550	6 531	6 811
b. LNPRT	63	68	77	79	83
c. Pemerintah	1 037	1 090	1 156	1 157	1 210
Jumlah	6 605	7 146	7 784	7 767	8 104
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	7 972	8 213	8 567	8 433	9 333
Proporsi	82,85	87,01	90,86	92,10	86,83

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

**Gambar 4. 2 Nilai Konsumsi Akhir (miliar rupiah) dan Peranan Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Berdasarkan data dan grafik di atas dapat kita ketahui bahwa lebih dari 80 persen dari total PDRB Kabupaten Bangka Tengah merupakan konsumsi akhir. Artinya, sebagian besar barang dan jasa yang dihasilkan dan ada di Kabupaten Bangka Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Jika tidak ada kondisi luar biasa, nilai konsumsi akhir dan proporsinya terhadap PDRB terus meningkat seperti yang terjadi pada 2017 hingga 2020, yaitu dari 6.605 miliar rupiah menjadi sebesar 7.784 miliar rupiah pada 2019. Namun, terjadi kondisi luar biasa yaitu pandemi covid-19 yang membuat nilai konsumsi akhir turun menjadi

7.767 miliar rupiah pada 2020, meskipun akhirnya kembali meningkat pada 2021 menjadi sebesar 8.104 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan akan produk yang dihasilkan untuk memenuhi konsumsi domestik. Dengan kata lain, produk yang tidak digunakan untuk konsumsi akhir, antara lain untuk investasi fisik (PMTB) atau untuk diekspor ke luar wilayah Kabupaten Bangka Tengah memiliki peran yang lebih kecil.

#### 4.4 Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Ekspor-impor barang dan jasa didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan ekonomi, baik berupa penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah atas barang dan jasa antara residen kabupaten/kota dengan pelaku ekonomi non residen yang berasal dari luar kabupaten/kota, baik Indonesia maupun luar negeri (*United Nations*, 2009: 56)

Net ekspor merupakan selisih antara ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor barang dan jasa. Jika nilai ekspor positif dapat diartikan neraca perdagangan mengalami surplus. Sebaliknya, jika net ekspor negatif maka neraca perdagangan mengalami defisit.

**Tabel 4.4 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor (X – M) (miliar rupiah)	-853	-1 405	-2 020	-1 920	-1 470
Peranan Net Ekspor (%)	-10,70	-17,11	-23,58	-22,76	-15,75
Net Ekspor (ADHK) (miliar rupiah)	-78	-194	-454	-427	-342

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Selama lima tahun terakhir, Neraca perdagangan Kabupaten Bangka Tengah atas dasar harga berlaku dan konstan mengalami defisit. Ini mengindikasikan bahwa, output yang dihasilkan oleh lapangan usaha di Kabupaten Bangka Tengah selama periode 2017-2021 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir pemerintah, konsumsi akhir lnprt, pembentukan modal tetap bruto (pmtb), dan inventori. Oleh sebab itu, angka impor barang/jasa lebih tinggi daripada ekspornya sendiri. Defisit tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana memang pada tahun tersebut, satu-satunya smelter yang ada di Bangka Tengah harus ditutup sehingga mengurangi ekspor logam timah sampe ke titik nol.

#### 4.5 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sementara output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”nilai tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit, dengan formula sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana:  $I_t$  = PMTB tahun ke t

$Y_t$  = Output tahun ke t

$Y_{t-1}$  = Output tahun ke t-1

**Tabel 4.5 Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Bangka Tengah, 2017-2021**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	5 621	5 813	5 883	5 715	5 987
Perubahan (miliar rupiah)	188	192	70	-168	272
PMTB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	1 335	1 430	1 555	1 448	1 481
ICOR	7,10	7,45	22,21	-8,62	5,44

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa selama lima tahun terakhir, besaran ICOR tertinggi terjadi pada 2017, yaitu sebesar 22,21. Artinya, untuk menaikkan output sebesar 1 miliar rupiah, membutuhkan investasi sebesar 22,21 miliar rupiah. Jika diperhatikan, ada sedikit perbedaan

barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Pada kenyataannya, penambahan/pengurangan output bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor lain selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>





# BAB V



PENUTUP



## **BAB V**

### **PENUTUP**

- a. PDRB menurut pengeluaran tahun 2017-2021 dapat menggambarkan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah pada periode bersangkutan. Berbeda dengan analisis ekonomi dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi, analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
- b. Analisis yang disajikan merupakan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri, dan perdagangan antar daerah. Analisis tersebut didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Dengan menambahkan beberapa indikator sosial demografi, seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai pemerintah, hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
- c. Penyajian data dalam publikasi ini dalam bentuk series, yaitu dari tahun 2017-2021. Hal ini untuk memudahkan dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Satuan dari masing-masing parameter juga berbeda-beda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
- d. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan bahan acuan dalam melakukan pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain, seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan Neraca Arus Dana.
- e. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*), provinsi lain ataupun kabupaten/kota secara agregat disajikan di sini, dalam bentuk transaksi ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*), provinsi lain, maupun kabupaten/kota lainnya.





LAMPIRAN



## LAMPIRAN

Lampiran 1.

### Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5 504 931	5 987 516	6 549 904	6 531 471	6 811 176
2. Konsumsi LNPRT	63 078	68 086	77 447	78 660	83 483
3. Konsumsi Pemerintah	1 036 714	1 090 111	1 156 322	1 156 963	1 209 727
4. PMTB	2 192 381	2 442 914	2 767 986	2 581 689	2 692 336
5. Perubahan Inventori	28 484	30 003	35 097	3 984	6 436
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-853 377	-1 405 311	-2 019 859	-1 919 521	-1 470 308
<b>PDRB</b>	<b>7 972 210</b>	<b>8 213 317</b>	<b>8 566 896</b>	<b>8 433 246</b>	<b>9 332 849</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara



Lampiran 2.

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017-2021**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 644 858	3 832 877	4 013 333	3 977 615	4 099 537
2. Konsumsi LNPRT	41 186	44 243	49 460	49 612	51 378
3. Konsumsi Pemerintah	651 120	668 410	683 410	660 697	688 003
4. PMTB	1 334 958	1 430 445	1 555 091	1 447 977	1 481 081
5. Perubahan Inventori	26 942	30 881	36 139	5 725	8 985
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-78 450	-194 159	-454 336	-426 738	-342 087
<b>PDRB</b>	<b>5 620 615</b>	<b>5 812 697</b>	<b>5 883 096</b>	<b>5 714 889</b>	<b>5 986 898</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

<https://bangkatengahkab.go.id>

Lampiran 3.

**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2017-2021**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Konsumsi Rumah Tangga	69,05	72,90	76,46	77,45	72,98
2. Konsumsi LNPRT	0,79	0,83	0,90	0,93	0,89
3. Konsumsi Pemerintah	13,00	13,27	13,50	13,72	12,96
4. PMTB	27,50	29,74	32,31	30,61	28,85
5. Perubahan Inventori	0,36	0,37	0,41	0,05	0,07
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-10,70	-17,11	-23,58	-22,76	-15,75
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Lampiran 4.

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran (persen), 2017-2021**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,25	5,16	4,71	-0,89	3,07
2. Konsumsi LNPRT	6,39	7,42	11,79	0,31	3,56
3. Konsumsi Pemerintah	5,43	2,66	2,24	-3,32	4,13
4. PMTB	4,73	7,15	8,71	-6,89	2,29
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>3,46</b>	<b>3,42</b>	<b>1,21</b>	<b>-2,86</b>	<b>4,76</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

<https://bangkatenkab.bps.go.id>

Lampiran 5.

**Laju Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto  
Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen),  
2017-2021**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,80	5,90	5,82	3,44	4,47
2. Konsumsi LNPRT	8,87	5,70	4,93	0,48	1,75
3. Konsumsi Pemerintah	6,07	8,69	2,56	2,71	3,47
4. PMTB	5,66	7,40	6,22	3,99	4,37
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>5,15</b>	<b>2,71</b>	<b>3,17</b>	<b>-0,34</b>	<b>3,13</b>

*Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara*





# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah  
Jl. Raya By Pass Koba 33681  
Telp/Fax: (0718) 7362084  
E-mail: [bps1904@bps.go.id](mailto:bps1904@bps.go.id)  
Homepage: <http://bangkatengahkab.bps.go.id/>

